

Distorsi Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo Dalam Perspektif Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*

Oleh: Bernardus Badj

Mahasiswa IFTK Ledalero Prodi Filsafat

***Abstraksi:** Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas mengalami pembangunan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, percepatan ini kerap menimbulkan distorsi berupa ketimpangan sosial, marginalisasi masyarakat lokal, dan degradasi lingkungan. Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* karya Paus Yohanes Paulus II memberikan kerangka etis tentang solidaritas, pembangunan autentik, dan keadilan sosial yang dapat dijadikan lensa kritis dalam menelaah fenomena ini. Tulisan ini mengkaji sejauh mana pembangunan pariwisata di Labuan Bajo selaras dengan prinsip-prinsip ajaran sosial Gereja Katolik. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, ditemukan bahwa pembangunan yang bersifat eksploitatif cenderung mengabaikan prinsip keutuhan manusia dan *bonum commune* (kebaikan bersama). Oleh karena itu, dibutuhkan reorientasi kebijakan pembangunan yang menempatkan manusia dan lingkungan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek ekonomi.*

***Kata-kata Kunci:** Labuan Bajo, pariwisata, distorsi pembangunan, *Sollicitudo Rei Socialis* dan Ajaran Sosial Gereja.*

1. Pendahuluan

Diskursus tentang pembangunan (*development*)¹ menjadi salah satu persoalan yang banyak dikaji pada dua dekade terakhir. Pembangunan seringkali diklaim sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memanusiakan manusia dan dunianya. Namun tidak disangka bahwa acap kali terjadi praktik-praktik pembangunan yang bercorak dehumanis. Aneka proyek mercusuar hanya mementingkan segelintir orang dan menjadikan banyak orang sebagai tumbal.

¹ Pembangunan mengacu pada proses menuju perkembangan atau berkembang ke arah yang lebih baik secara ekonomi, politik sosial dan budaya. perkembangan berhubungan dengan pertumbuhan sosial ekonomi sesuai dengan aspek-aspek pengukuran yang digunakan di dalamnya. Secara sederhana pembangunan dalam pembahasan ini mengacu pada sebuah proses politik penyusunan kebijakan dalam publik (*public policy*) yang mengacu pada kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan sesungguhnya berkaitan dengan banyak isu seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, akses sosial ke dalam jaringan kebijakan publik, politik pendidikan yang tidak adil, kemerdekaan gender dan isu-isu sentral lainnya. Max Regus “Membongkar Aib Pembangunan” dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, dan Anselmus Meo (ed). *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2012), 369.

Pembangunan ternyata melenceng dari tujuan intrinsiknya dan memperluas disparitas sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia saat ini dikategorikan sebagai suatu pembangunan yang bercorak dehumanis. Manusia sebagai individu dalam masyarakat yang menjadi muara dan target pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, justru dilecehkan dan dieksploitasi sebagai sarana belaka untuk kepentingan sesaat.

Gereja sebagai saksi kerajaan Allah di dunia tidak menutup mata terhadap problematika kemanusiaan. Gereja prihatin dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh umat manusia. Konstitusi pastoral "*Gaudium et Spes*" secara tandas melansir sikap bapa-bapa Konsili Vatikan II sebagai pantulan sikap Gereja sejagat. "*Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula*"² Tanggapan Gereja yang paling efektif nyata dalam karya-karya sosial dan dimaklumpkannya dalam ajaran-ajaran Gereja. Satu di antara ajaran-ajaran sosial Gereja adalah ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (SRS) dari Paus Yohanes Paulus II. Ensiklik ini menjelaskan dan memuat evaluasi kritis atas ruat pembangunan dan memberikan himbauan etis kearah restorasi.

2. **Krisis Pembangunan Pariwisata Di Labuan Bajo, Manggarai Barat**

Secara sosial pembangunan tidak selamanya dapat membahagiakan dan mensejahterakan manusia. Hal ini terjadi juga di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Pemerintah pusat sedang giat-giatnya menggerakkan seluruh pikiran, tenaga dan biaya untuk membangun dunia pariwisata di Labuan Bajo, setelah Denpasar, Bali. Pemerintah pusat pun telah menetapkan Labuan Bajo sebagai tujuan wisata super premium. Ini berarti pemerintah pusat mau mengembangkan pusat pembangunan baru, pusat ekonomi baru di Indonesia.³ Dalam konteks ini, pemerintah pusat pun

²J. Riberu, *Tonggak Sejarah Pedoman Arah: Dokumen-Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Penerbit Dokpen MAWI, 1983), 476.

³ Selivino Koe Baghi (ed), "Tumbul-tumbul Pembangunan: Kontroversi Pariwisata Super Premium Labuan Bajo"

mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Sayangnya, kenyataan tersebut hanya melahirkan dominasi, pencaplokan sumber daya, marginalisasi, subordinasi, dan eksploitasi.

Pembangunan pariwisata tentu saja harus meliputi tiga aspek ini, yaitu ekonomi, politik dan budaya karena ketiganya saling terkait satu sama lain. Hal yang sama pun harus nampak dalam pembangunan pariwisata Labuan Bajo. Status spesial pariwisata Labuan Bajo harus menjadikannya sebagai area yang tidak hanya dibanjiri oleh arus modal para investor, tetapi juga arus penyebaran pengaruh agama dan kebudayaan asing, pandangan hidup, pola hidup dan gaya hidup, serta sisi kelam dari pariwisata seperti industri seks, perdagangan narkoba dan lain-lain. Tentu saja kondisi ini memuat potensi konflik yang tak dapat dihindari.⁴

Pertanyaan yang perlu direfleksikan adalah untuk kepentingan siapa pembangunan pariwisata Labuan Bajo dilaksanakan secara besar-besaran? Di sini semakin jelas bahwa pembangunan yang bersifat ideologis tidak ada banyaknya. Sebab segala upaya pembangunan hanya akan menguntungkan segelintir orang yaitu kaum elitis, dan para penguasa sendiri. Sedangkan rakyat kecil hanya digunakan sebagai dalih oleh penguasa untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Misalnya, telah terjadi cara-cara penyingkiran masyarakat lokal di Labuan Bajo, salah satunya melalui turisme. Pertanyaannya, apakah turisme sebagai akhir atau pintu utamanya?

Setelah menjadi kota tujuan pariwisata di Indonesia dan dunia, wisatawan baik lokal maupun asing, ramai-ramai mengeluarkan banyak dana untuk menikmati keindahan alam dan binatang komodo di Labuan Bajo. Karena itu, pariwisata Labuan Bajo tidak hanya menjadi *icon* dan kebanggaan masyarakat

<http://ekorantt.com/2020/10/03/tumbal-tumbal-pembangunan-kontroversi-pariwisata-super-premium-labuan/bajo/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2024).

⁴ Mathias Daven, "Globalisasi dan Pariwisata Sebagai Fenomena Kebudayaan" (Jakarta: Penerbit Obor, 2023) <http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/1461>. pdf (diakses pada tanggal 03 Maret 2024).

lokal, akan tetapi kondisi tersebut sangat rawan bagi terjadinya konflik-konflik berkaitan dengan sumber-sumber penghidupannya. Ini sebuah ancaman serius yang mesti diwaspadai sejak dini.

Labuan Bajo juga mempunyai kekayaan alam lainnya yang sangat menawan yaitu gugusan pulau dan pesisir pantai. Semua ini semakin menarik wisatawan untuk datang ke Labuan Bajo. Pembangunan besar-besaran pun terjadi di Labuan Bajo. Jalur-jalur transportasi darat diperbaiki (trans Flores). Jalanan di pusat kota di Labuan Bajo disulap menjadi begitu mulus, semulus keuntungan yang didapatkan oleh segelintir orang. Hotel-hotel tumbuh subur di Kota Labuan Bajo dan pulau-pulau sekitarnya. Sementara itu, sarana dan prasarana transportasi udara di Bandara Udara Labuan Bajo juga didesain dan dibangun dengan skala internasional. Bandara Komodo kini hadir dengan tampilan baru dan megah. Banyak moda transportasi udara seperti Air Asia, Garuda Airline, Batik Air, Citilink, Lion Air, Super Jet, dan Wings Air setiap hari melayani para wisatawan berkunjung ke Labuan Bajo.

Pertanyaannya, untuk siapa Bandara Internasional Komodo dibangun? Apakah hal ini untuk menunjang para wisatawan asing maupun para investor asing agar dapat dengan mudah meraup keuntungan ekonomis di Labuan Bajo? Pernyataan ini merupakan sebuah ironi karena masyarakat di Labuan Bajo bahkan Manggarai Barat tidak akan semuanya menikmati dan merasakan fasilitas Bandara Komodo yang megah. Lalu, siapa yang menguasainya? siapa yang diuntungkan? dan siapa yang dikorbankan?⁵

Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) yang menjadi *icon* Labuan Bajo, bahkan Nusa Tenggara Timur itu pun menuai konflik antara warga yang tinggal berdekatan dengan kawasan TNK. Salah satunya warga di Desa Papagarang (nelayan). Mereka biasa menangkap ikan hingga ke Pulau Komodo, bahkan sampai ke Bima.⁶ Di sinilah awal mula penyingkiran masyarakat setempat.

⁵ Siti M. Qori'ah "Marginalisasi di Kota Labuan Bajo" dalam *Pariwisata, Pembangunan, dan Keadilan Agraria di Flores* (Manggarai Barat: Penerbit Divisi Riset dan Publikasi Sunspirit for Justice and Peace, 2016), 32.

⁶ *Ibid.*, 33-34.

Jelaslah, bahwa yang dikorbankan dengan adanya pariwisata di Labuan Bajo adalah masyarakat lokal.

Selain itu, masyarakat lokal juga tidak memperoleh fasilitas publik, seperti sekolah, air bersih, dan sertifikat tanah. Bahkan mereka pun merasakan bahwa keberadaan desanya di dalam kawasan TNK merupakan sebuah kesengsaraan, karena mereka sama sekali tidak diuntungkan oleh adanya pariwisata di Labuan Bajo. Hal ini menegaskan bahwa pihak yang diuntungkan adalah korporasi-korporasi dan investor asing.

Permasalahan lain yang dialami masyarakat lokal adalah krisis air minum. Air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik pemerintah lebih banyak dialirkan ke hotel-hotel besar. Air itu selain digunakan untuk minum, air juga digunakan untuk kolam renang dan berbagai kolam hias milik hotel. Masyarakat lokal semakin kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Bahkan mereka harus membeli air yang dijual menggunakan mobil tangki dari pengusaha-pengusaha air swasta dengan harga yang mahal.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pada akhirnya hanya melahirkan dominasi, pencaplokan sumber daya, marginalisasi, subordinasi, eksploitasi, dan kekerasan dalam berbagai bentuknya.

3. Manusia di Tengah Gemuruh Pembangunan

3.1. Otentisitas Pembangunan Manusia

Setelah menguak kepincangan haluan pembangunan, Paus Yohanes Paulus II mengemukakan elemen-elemen penting sehubungan dengan pembangunan manusia sejati. Pembangunan manusia yang terpadu tidak bisa dipisahkan dari karya penebusan Kristus dan keterarahan manusia kepada Allah sebagai tujuan final. Perkembangan tidak bisa dibatasi hanya dalam bidang ekonomis. Pembangunan yang benar adalah harus membawah manusia seutuhnya dalam segala dimensinya. Martabat manusia sebagai insan pribadi dan sosial perlu mendapat penghargaan yang sewajarnya.

⁷ Benny Denar, "Sisi Antagonis Pembangunan dan Opsi Dekolonial Dalam Teologi Katolik" dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger (ed.) *Hidup Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2019), 459.

Reduksi materialistik hanya mengungkung manusia sebagai budak dari barang-barang. Tendensi picik ini digugat oleh Gereja. "Manusia lebih bernilai karena apa yang ia ada daripada karena apa yang ia miliki. Demikian pula semua yang manusia lakukan untuk memperoleh keadilan yang lebih besar; persaudaraan yang lebih luas serta penataan yang lebih manusiawi dalam hubungan-hubungan sosial lebih berharga dari kemajuan teknik" (GS. 35)".⁸

Pembangunan sebagai perwujudan diri manusia mesti dituntun oleh gambaran manusia yang tepat. Kitab *Genesis* mematok manusia (pria dan perempuan) sebagai makhluk ciptaan seturut citra Allah. Hakikat keserupaan dengan Allah merupakan anugerah sekaligus dinamika tugas yang selalu dikonservasi selaras sejarah hidup. Proyek perkembangan mengandung dimensi sosial (misi sosial). Kemajuan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama dan tanggung jawab sosial untuk mengembangkan segenap bangsa manusia.

Paus merombak perspektif perkembangan dari sekedar peradaban material menuju kebudayaan kasih. Pembangunan yang tulus hendaknya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan spesifik manusia, kesadaran yang hidup akan nilai-nilai dan respek terhadap hak asasi manusia. Harkat hidup setiap segmen masyarakat patut dihormati. Iklim keadilan dalam kerja tidak lupa diekspresikan. Kebebasan menganut agama dan menjalankan kepercayaan sebagai panggilan transendensi manusia senantiasa diawetkan. Identitas historis-kultural setiap bangsa tidak boleh diselewengkan. Prinsip persamaan fundamental, solidaritas, kebebasan dan kasih menjadi pilar-pilar yang tidak boleh diabaikan. Tambahan pula, pemanfaatan sumber daya alam harus tetap mempertentangkan nasib generasi mendatang (tanggung jawab futuris).

Patokan-patokan ini akan berjalan baik bila semua orang menanggalkan cadar egoisme dan ketidaktaatan yang mengaburkan gambaran Ilahi. Kesadaran akan realitas dosa hendaknya menuntun manusia kepada iman akan Kristus dan motivasi-motivasi yang dipersembahkan-Nya. Dalam Kristus dosa dalam segala

⁸ J. Riberu, *op. cit.*, 512.

wujudnya telah dibinasakan. Kemenangan dan kemuliaan Kristus menjadi jaminan bagi perkembangan yang membahagiakan umat manusia. Perkembangan bangsa manusia senantiasa bersumber pada pola Yesus Kristus sendiri.

3.1. Analisis Teologis atas Problematika Pembangunan

Pembangunan bukanlah eksklusif masalah politik dan ekonomi, tetapi juga masalah etis. Sebagai suatu persoalan politik, pembangunan menagih tekad bersama secara politis pula. Pola yang diselewengkan layak diperbaiki dengan kiat politik yang berorientasi pada *bonum commune*. Kemauan politik semata belum memadai. Ensiklik SRS sebagai dokumen pastoral dan Ajaran Sosial Gereja menempatkan taktik politis dalam nuansa teologis.

Menurut ensiklik SRS, dunia yang terpilah-pilah dan aneka sisi negatif pembangunan konstruksi di atas struktur-struktur dosa. Struktur dosa berbuat baik pada wilayah pribadi, kolektif maupun instansional. Gagasan teologis ini senantiasa menyertakan kehendak Allah, rencana-Nya terhadap manusia, keadilan dan kerahiman-Nya. Siklus dosa tersebut membawa dua konsekuensi lanjut.

Pertama, kesenjangan sosial: sebagai roman sedih pembangunan bukan meluluh perkara ekonomis, juga bergantung pada sikap-sikap dasar dan pilihan nilai-nilai yang dianut manusia. *Optio fundamentalis* manusia sering kali meleset sehingga melestarikan ketimpangan yang ada pada masyarakat. Perubahan hanya bisa terjadi bila manusia rela dan berani untuk mengubah orientasi dan mengkonstruksi pilihan nilai-nilai yang dianutnya.

Kedua, secara teologis, realitas dosa mengajarkan manusia bahwa perubahan sikapnya bisa terjadi bila ada pertobatan dalam diri manusia dan intervensi rahmat Allah. Perubahan hati dari egoisme dan keterarahan kepada Allah yang dilakukan dalam terang iman akan Allah dan penebalan sikap solidaritas kemanusiaan. Kebajikan luhur ini hendaknya lahir dari konversi (vertikal dan horisontal) yang kontinu dan bertanggung jawab.

4. Refleksi Aplikatif

1.1. Menuju Model Pembangunan Yang Humanis

Sembari tetap menempatkan manusia sebagai subjek dan sasaran tunggal pembangunan, ensiklik SRS membicarakan pembangunan dalam perkara moral dan tanggung jawab sosial. Secara kritis, SRS menganalisis pamrih-pamrih pembangunan dan interese-interese yang merugikan umat manusia. Pembangunan yang pada prinsipnya merangsang kemajuan malah membawa soal-soal baru yang pelik. Di balik slogan-slogan kesejahteraan yang diemban pembangunan bergiat epidemi yang mengancam eksistensi manusia.

SRS berhasil mendeteksi akar ketidakberesan yakni pada realitas dosa (struktur dosa). Dosa telah mengaburkan gambaran manusia sebagai cerminan wajah Allah. Upaya penanggulangan problematika pembangunan tidak bisa dipisahkan dari usaha rekonsiliasi dan metanoia. *"Harus semuanya... berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya"* (Yun 3:8). Tindakan ini justru lahir dari kesadaran iman dan upaya untuk merestorasi hidup pribadi dan sosial (misi kolektif). Dari akar iman inilah tumbuh taruk keprihatinan pada masalah-masalah sosial.

Eksplorasi SRS terhadap kelemahan pembangunan tentu menagih respon untuk suatu akselerasi pembangunan yang berperikemanusiaan. Pembangunan dengan visi humanis tentu tidak bisa mengabaikan beberapa segmen berikut:

Pertama, respek terhadap hak-hak fundamental manusia. Klaim-klaim politik pembangunan seringkali 'menganaktirikan' aspek ini. Dalih-dalih pembangunan tidak jarang mengalienasikan masyarakat bahkan menjadi proses *pemiskinan*. Pembangunan digiatkan untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan. Hak-hak asasi manusia tidak pernah boleh diselewengkan hanya demi interese pembangunan yang sempit. Bila ada konflik dalam pembangunan maka yang lemah jangan dijadikan makanan empuk yang kuat. Kesejahteraan manusia yang menjadi sasaran tunggal pembangunan meliputi seluruh manusia tanpa adanya pengkotakan.

Kedua, pembangunan hendaknya berpijak pada prinsip demokrasi dan transparansi kebijakan ekonomi serta moneter. Dalam hal ini kebiasaan distorsi politik ekonomi berupa campur tangan *invisible hand* dan *invisible foot* harus dibasmi secara radikal.

Ketiga, orientasi pertumbuhan perlu ‘berbarengan’ dengan pemerataan. Bila hanya pertumbuhan yang dikejar, maka deretan kemiskinan selalu bertambah panjang dan kesenjangan sosial kian menggurita. Kiat pertumbuhan selalu melihat pembangunan suatu negara, dalam konteks ini pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dalam neraca perbandingan dengan negara ini. Memang kenyataan ini wajar, tetapi yang berlaku justru determinasi. Pembangunan pariwisata di Labuan Bajo akhirnya tidak sepadan dengan kondisi setempat. Kemiskinan ditilik sebagai ‘borok’ sosial yang harus diberantas sebatas permukaan dan tanpa menggali akarnya yang terdalam. Tidak heran kebijakan pembangunan untuk memberantas kemiskinan seperti IDT (trik untuk memuaskan para pemberi modal) menjadi cerita sedih kegagalan pembangunan yang tidak berujung.

Keempat, supremasi prinsip keadilan. Keadilan artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam kaitan dengan keadilan sosial dalam pembangunan, Peter L. Berger melalui bukunya *Pyramid of Sacrifice*, menganjurkan dimensi moral yaitu masalah tentang biaya-biaya yang boleh jadi ada dalam kebijaksanaan politik. Seorang politisi harus memperhitungkan akibat-akibat tindakannya bagi orang lain, terutama pertimbangan-pertimbangan biaya, yaitu perhitungan penderitaan (*calculus of pain*) dan perhitungan makna (*calculus of meaning*).⁹

Kelima, tanggung jawab futuris. Pembangunan tidak boleh melalaikan segi solidaritas dengan generasi mendatang. Tidak salah lagi bahwa bumi ini cuma pinjaman dari generasi berikut.

2. Penutup

⁹ Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*, penerj. A. Rahman Toleng (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2004), Viii-ix.

Strategis pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah, gereja dan organisasi-organisasi mesti memperjuangkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, melindungi hak-hak asasi manusia, memperhatikan masyarakat yang dipinggirkan dan yang berkurang akibat dampak dari pembangunan pariwisata, serta kepentingan ekonomi masyarakat melalui penciptaan regulasi penguasaan lahan. Bukan untuk menciptakan wacana-wacana kebijakan yang merugikan masyarakat. Sebab pembangunan pada hakikatnya yang terdalam untuk membebaskan manusia dari penderitaan dan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena itu, sumbangan pembangunan yang dianjurkan dalam ensiklik SRS adalah etika humanistik yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan.

□ **Rekomendasi Etis**

Ensiklik SRS yang mengupas kelemahan pembangunan tidak menawarkan solusi-solusi teknis. Ajaran Sosial Gereja ini hanya menghadirkan tablet etis berupa solidaritas. Solidaritas berbasis pada kredo bahwa Tuhanlah Bapa semua orang dan segenap manusia adalah saudara-saudari, anggota keluarga besar Kerajaan Allah. Solidaritas berarti semua bertanggung jawab atas semua. Solidaritas infrahuman merupakan buah solidaritas Allah dalam Kristus kepada kita. Kini solidaritas diartikulasikan dengan aksentuasi pada mengutamakan kaum miskin (*preferential option for the poor*).

Pilihan mendahulukan kaum miskin tidak identik dengan melawan pihak yang tidak berada dalam kualifikasi ini. Gereja melawan praktik manipulasi dan eksploitasi terhadap kaum marjinal. Gereja tidak bersikap netral karena bersikap netral berarti kemunafikan. Kondisi dunia dan kemanusiaan yang laknat tidak pernah boleh memadamkan harapan akan masa depan yang lebih baik dalam diri kaum beriman dan umat manusia seluruhnya. Optimisme akan keceriaan kelak mengundang umat beriman untuk mencurahkan segala tenaganya dalam aktivitas pembangunan dengan topangan etika kebersamaan dan solidaritas

3. **Daftar Pustaka**

- Berger, Peter L. *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Penerj. A. Rahman Tolleng. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2004.
- Baghi, Selivino Koe, ed. “Tumbul-tumbul Pembangunan: Kontroversi Pariwisata Super Premium Labuan Bajo” <http://ekorannt.com/2020/10/03/tumbal-tumbal-pembangunan-kontroversi-pariwisata-super-premium-labuan/bajo/>. (diakses pada tanggal 25 maret 2024).
- Denar, Benny. “Sisi Antagonis Pembangunan dan Opsi Dekolonial Dalam Teologi Katolik” dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger, ed. *Hidup Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Daven, Mathias. “Globalisasi dan Pariwisata Sebagai Fenomena Kebudayaan”. Jakarta: Penerbit Obor. <http://repositrory.iftkledalero.ac.id/id/eprint/1461.pdf> (diakses pada tanggal 03 Maret 2024).
- Qoriah, Siti M. “Marginalisasi di Kota Labuan Bajo”, dalam Tim Penyusun. *Pariwisata, Pembangunan, dan Keadilan Agraria di Flores*. Manggarai Barat: Penerbit Divisi Riset dan Publikasi Sunspirit for Justice and Peace, 2016.
- Riberu, J. *Tonggak Sejarah Pedoman Arah: Dokumen-Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Penerbit Dokpen MAWI, 1983.
- Regus, Max. “Membongkar Aib Pembangunan”, dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, dan Anselmus Meo, ed. *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.